



# LAPORAN

---

## GCF TASK FORCE PERTUKARAN TEKNIS

### Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Konservasi dan Restorasi



**Laporan Pertukaran Teknis GCF Task Force**  
**Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Konservasi dan Restorasi**  
*Kalimantan Barat, Indonesia\**

DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ringkasan Eksekutif.....</b>                                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>POIN-POIN PENTING.....</b>                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Sesi.....</b>                                                                                                   | <b>5</b>  |
| 1. Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi.....                                                           | 5         |
| 2. Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat.....                                                      | 9         |
| 3. Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan<br>Mekanisme Solusi Berbasis Alam..... | 12        |
| 4. NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan.....                                                                         | 16        |
| 5. Mendukung Mitigasi dan Adaptasi melalui Mekanisme Pembiayaan Hukum<br>Inovatif (BLUD).....                      | 20        |
| <b>Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya.....</b>                                                                     | <b>22</b> |

## Ringkasan Eksekutif

Perwakilan dari delapan negara dan lebih dari selusin yurisdiksi hutan tropis berkumpul di Bogor, Jawa Barat, <sup>1</sup>pada tanggal 9-10 September untuk Pertukaran Teknis tentang "Kemitraan Publik-Swasta dalam Konservasi dan Restorasi," yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan diorganisir oleh Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governors' Climate and Forests Task Force, GCF Task Force).

Pertukaran ini mempertemukan yurisdiksi anggota GCF Task Force dari Indonesia, Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Peru, dan Amerika Serikat, bersama dengan provinsi non-anggota dari Indonesia, organisasi mitra, dan pelaku sektor swasta. Selama dua hari sesi pleno, berbagi pengalaman, dan diskusi kelompok, para peserta mengeksplorasi bagaimana pemerintah dan perusahaan dapat bergerak melampaui pendekatan yang terfragmentasi menuju model yurisdiksi terpadu untuk konservasi hutan dan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada [Ekonomi Hutan Baru](#). Sesi-sesi tersebut diorganisir berdasarkan lima tema:

1. Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi
2. Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat
3. Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam
4. NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan
5. Mendukung Mitigasi dan Adaptasi melalui Mekanisme Pembiayaan Inovatif (BLUD) <sup>2</sup>

Pertukaran ini memberikan kesempatan untuk mempresentasikan opsi-opsi yang layak untuk keterlibatan sektor swasta dalam program konservasi dan restorasi di wilayah yurisdiksi GCF Task Force, membahas cara melembagakan opsi-opsi ini, dan mengidentifikasi kekuatan serta tantangannya.

---

<sup>1</sup>Pertukaran Teknis awalnya dijadwalkan berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, dari tanggal 7-10 September 2026, tetapi dipindahkan dan kemudian dipersingkat karena kebakaran hutan yang meluas di seluruh Kalimantan dan letusan Anak Krakatau.

<sup>2</sup>Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibahas sebagai salah satu contoh mekanisme pembiayaan legal yang inovatif.



## POIN-POIN PENTING

Delapan tema lintas sektoral muncul dari diskusi tersebut:

**Sektor swasta harus menjadi mitra inti, bukan pendukung pinggiran.** Di setiap sesi, peserta menekankan bahwa konservasi yang efektif membutuhkan keterlibatan sektor swasta dalam tata kelola, pembiayaan, dan implementasi, bukan hanya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau investasi sekali saja.

**Pendekatan yurisdiksional memungkinkan kolaborasi yang efektif dalam skala besar.** Baik melalui cagar biosfer, strategi Produksi, Konservasi & Inklusi (Produser, Conservator e Incluir, PCI), atau kerangka kerja yurisdiksional untuk Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduce Deforestation and forest Degradation, REDD+), pendekatan tingkat lanskap menyediakan data, standar, dan tujuan bersama yang memungkinkan pemerintah, perusahaan, produsen, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam skala besar.

**Pendanaan harus bersifat jangka panjang, terdiversifikasi, dan inovatif.** Model yang paling sukses menggabungkan anggaran publik, investasi swasta, pendapatan karbon, pembiayaan campuran, dana konservasi, pembayaran berbasis hasil, dan instrumen inovatif. Tidak ada satu sumber pendanaan pun yang cukup untuk mempertahankan konservasi pada skala yurisdiksi.

**Mekanisme pasar membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang dan keterlibatan sektor swasta sejak dini.** Baik itu pasar karbon; persyaratan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation, NDPE); atau kepatuhan terhadap Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (European Union Regulation on Deforestation-free Products, EUDR), sektor swasta membutuhkan aturan yang

dapat diprediksi dan harus berpartisipasi dalam desain pasar sejak awal — bukan hanya setelah pasar terbentuk. Ketidakpastian mempersulit upaya menarik investasi sektor swasta jangka panjang.

**Petani kecil dan masyarakat harus menjadi peserta aktif, bukan penerima pasif.**

Keterlibatan mereka yang bermakna dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan pembagian manfaat sangat penting untuk legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Lebih lanjut, standar kepatuhan, biaya sertifikasi, dan peraturan internasional (seperti EUDR) berisiko memberikan beban yang tidak merata pada petani kecil yang seringkali kekurangan legalitas lahan, infrastruktur, pembiayaan, dan akses langsung ke pasar ekspor utama.

**Data, transparansi, dan akuntabilitas memperkuat kemitraan.** Platform pengungkapan seperti CDP, sistem pemantauan, dan mekanisme ketertelusuran menciptakan basis bukti bersama yang menjadi dasar kepercayaan antara aktor publik dan swasta.

**Kepercayaan adalah persyaratan yang sangat penting.** Lembaga yang transparan, perantara yang kredibel, dan hubungan yang berkelanjutan membangun keyakinan yang dibutuhkan pemerintah, masyarakat, donor, dan pelaku sektor swasta untuk berkomitmen pada kemitraan konservasi jangka panjang.

**Pembelajaran lintas yurisdiksi mempercepat kemajuan.** Pertukaran itu sendiri menunjukkan bagaimana berbagi pengalaman antar negara dan konteks — dari Pembiayaan Proyek untuk Permanensi (Project Finance for Permanence, PFP) Meksiko hingga PCI Brasil hingga BLUD Indonesia — membantu yurisdiksi mengadaptasi model yang telah terbukti dan menghindari pengulangan kesalahan.

## Sesi

### 1. Inisiasi bersama: Upaya Restorasi dan Konservasi

Sesi ini berfokus pada studi kasus dari seluruh jaringan GCF Task Force, yang mengungkapkan bagaimana berbagai yurisdiksi membangun kemitraan praktis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.



#### **Koperasi Air di Tarija, Bolivia**

Departemen Tarija, Bolivia, menunjukkan bagaimana dana konservasi dan air dapat memobilisasi kontribusi sektor swasta untuk mewujudkan keamanan air bersama. Salah satu contohnya adalah koperasi air yang didirikan pada tahun 2022 bersama Nature Conservancy dan mitra lainnya, di mana sebagian dari biaya layanan air dialokasikan untuk konservasi sumber daya air. Pembayaran dari sektor swasta mencakup sekitar 30% dari anggaran. Inisiatif semacam ini sangat penting bagi industri anggur Tarija, yang bergantung pada irigasi.

#### **Pembiayaan Proyek untuk Keberlanjutan di Yucatán, Meksiko**

Negara Bagian Yucatán, Meksiko, memperkenalkan [Herencia Maya](#), sebuah inisiatif PFP pertama di negara tersebut dan yang pertama dipimpin oleh pemerintah negara bagian, bukan pemerintah nasional. Herencia Maya menyatukan pemerintah, donor, LSM, sektor swasta, dan komunitas adat di sekitar mekanisme pembiayaan konservasi jangka panjang senilai US\$12,6 juta yang dirancang untuk melindungi lebih dari 1,4 juta hektar lahan, hutan bakau, dan sumber

air tawar. Dengan menggunakan model PFP dalam kolaborasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL), Herencia Maya bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati regional, memerangi perubahan iklim, dan mendukung mata pencaharian tradisional Maya seperti agroforestri berkelanjutan dan peternakan lebah.

### **Memproduksi, Melestarikan, dan Mengintegrasikan di Mato Grosso, Brasil**

Mato Grosso, Brasil, membagikan Strategi [PCI](#) — sebuah pendekatan yurisdiksi yang diluncurkan pada tahun 2015 yang menghubungkan produksi pertanian berkelanjutan, konservasi hutan, dan inklusi sosial melalui platform investasi yang menghubungkan perusahaan, bank, dan mitra pembangunan dengan proyek-proyek yang selaras dengan keberlanjutan. Sebuah lembaga nirlaba bernama PCI Institute didirikan dalam kemitraan dengan Negara Bagian Mato Grosso untuk mendukung implementasi PCI dan menyertakan perwakilan sektor swasta dalam dewan pengurusnya. Inisiatif Mato Grosso juga mencakup Registri Lingkungan Pedesaan (Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural, SIMCAR) dan Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi dan Kebakaran Hutan (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Incêndios Florestais, PPCDIF/MT), yang keduanya selaras dengan Strategi PCI.

### **Inisiatif Lanskap Terpadu di Papua Barat, Indonesia**

Papua Barat, Indonesia, menggambarkan [Permata Mahkota Papua](#) - sebuah inisiatif lanskap terpadu seluas 2,3 juta hektar yang dibangun atas dasar kolaborasi antara pemerintah provinsi, masyarakat adat, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan hutan hujan primer yang kaya sekaligus mendukung masyarakat lokal melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan, kehutanan sosial, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

### **Pembiayaan Inovasi dan Kolaborasi Masyarakat Adat di Ekuador**

Direktur GCF Task Force untuk Ekuador mempresentasikan [Plataforma Amazonica](#), sebuah aliansi dari 11 kelompok masyarakat adat (La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE) dan enam prefek termasuk anggota GCF Task Force (Morona Santiago, Orellana, Pastaza, dan Zamora Chinchipe) dan pengamat (Napo dan Sucumbios) yang bekerja sama untuk melindungi 14 juta hektar hutan Amazon Ekuador. [Dana Masa Depan Amazon](#) (Fondo Futuro Amazónico, FFA) adalah dana perwalian inovatif yang dibangun di atas Plataforma Amazonica. Dana ini memungkinkan pengelolaan dan investasi sumber daya untuk mendukung konservasi wilayah Amazon dan tata kelola kolaboratif Platform Amazon.

## **POIN-POIN PENTING DARI SESI INI**

Konservasi dan restorasi tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja, dan kita perlu beralih dari proyek jangka pendek yang terfragmentasi menuju pendekatan yurisdiksional jangka panjang. Hasil yang berkelanjutan membutuhkan koalisi yang kuat, komitmen jangka panjang, lembaga yang efektif, partisipasi sektor swasta, pendanaan yang memadai, dan keterlibatan yang bermakna dari MAKL.

- Pendanaan jangka panjang dan terdiversifikasi sangat penting. Diperlukan pendanaan gabungan, peningkatan keterlibatan dengan bank, dan mekanisme inovatif yang melampaui REDD+.
- Landasan hukum yang kuat dan kerangka kelembagaan juga sangat penting untuk memastikan perlindungan sumber daya dalam jangka panjang.
  - Hal ini membantu memberikan kepastian bagi pelaku pasar dan lingkungan investasi, keberlanjutan di luar transisi pemerintahan, dan menunjukkan bahwa suatu program - REDD+, insentif, manfaat pajak untuk partisipasi sektor swasta, dll. - dirancang untuk jangka panjang.
- Kita perlu beralih dari proyek-proyek yang terfragmentasi dengan tujuan yang tidak terhubung dan dampak yang terbatas menuju pendekatan yurisdiksional dan regional yang mengintegrasikan prioritas lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam skala besar.
- MAKL harus menjadi peserta aktif, bukan hanya penerima manfaat. Kita juga harus memanfaatkan pengetahuan tradisional dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan modern.
- Agar berkelanjutan, konservasi harus menghasilkan nilai ekonomi yang nyata sekaligus meningkatkan taraf hidup. Produk-produk bernilai tinggi perlu dikembangkan, terutama di wilayah yang jauh dari pasar utama.
- Kepercayaan adalah fondasi penting untuk kemitraan dan pembiayaan konservasi jangka panjang. Lembaga yang transparan, perantara yang kredibel, dan hubungan yang berkelanjutan dapat membantu membangun kepercayaan di antara pemerintah, masyarakat, donor, dan pelaku sektor swasta.

## **TINDAKAN PRIORITAS UNTUK DILANJUTKAN**

- Membantu anggota GCF Task Force dalam memperkuat kebijakan, struktur kelembagaan, dan registrasi (seperti SIMCAR dan PCI di Mato Grosso) untuk melindungi inisiatif konservasi dari pergantian kekuasaan politik, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan menghubungkan produsen berkelanjutan secara langsung dengan bank dan investor korporasi.
- Teruslah mempromosikan pertukaran pengetahuan dan kolaborasi lintas yurisdiksi.
- Mendukung anggota GCF Task Force dalam upaya mereka untuk memperluas model pembiayaan inovatif dan campuran di luar skema REDD+ standar—seperti Pembiayaan Proyek untuk Keberlanjutan yang dipimpin negara (misalnya, Herencia Maya di

Yucatán), dana air yang memanfaatkan biaya layanan sektor swasta (misalnya, Tarija), dan dana perwalian regional khusus (misalnya, FFA di Ekuador).

- Jelajahi cara-cara tambahan untuk mengurangi risiko investasi dan menarik lebih banyak investasi sektor swasta, termasuk menyelidiki asuransi swasta sebagai mekanisme pembiayaan yang inovatif.

## **MODERATOR**

- Herlina Hartanto – Direktur Eksekutif, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
- Maria Calvo – Koordinator Pengembangan Bisnis, Fundación Natura Bolivia

## **PEMBICARA**

- Wakil Gubernur Gonzalo Avila, Tarija, Bolivia
- Sekretaris Pembangunan Berkelanjutan Neyra Silva Rosada, Yucatán, Meksiko
- Sekretaris Eksekutif Bidang Lingkungan Hidup Alex Marega, Mato Grosso, Brasil
- Profesor Charlie Heatubun, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Profesor Botani Hutan di Universitas Papua, Papua Barat, Indonesia
- Bruno Paladines, Direktur Negara GCF Task Force - Ekuador

## 2. Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta di Kalimantan Barat

Sesi ini menyoroti yurisdiksi tuan rumah, dengan Kalimantan Barat menampilkan inisiatif kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership, PPP) yang sedang berkembang.



### MAJU Kalbar - Inisiatif Rantai Nilai Komoditas Berkelanjutan

[MAJU Kalbar](#) adalah inisiatif tujuh tahun yang didanai oleh Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund, GCF) dan Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ini adalah inisiatif rantai nilai komoditas berkelanjutan yang diproyeksikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 16 juta tCO<sub>2</sub>eq, secara langsung menguntungkan 680.000 orang, dan memperkuat ketahanan iklim lebih dari 10 juta hektar hutan. Komoditas target meliputi minyak sawit, karet, kopi, kakao, kelapa, lada, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan dukungan untuk ketelusuran, sertifikasi, dan kepatuhan terhadap peraturan internasional seperti EUDR. Ini termasuk kemitraan publik-swasta untuk pengadaan berkelanjutan.

### Mata Pandawa – Usulan Cagar Biosfer UNESCO

Kalimantan Barat sedang mengupayakan proposal untuk mendapatkan status Cagar Biosfer UNESCO untuk Mata Pandawa, yang merupakan gabungan dari nama tiga wilayah: Karimata, Palung, dan Mendawak. Koridor Keanekaragaman Hayati Mendawak berfungsi sebagai habitat penting bagi orangutan. Ini akan menjadi Cagar Biosfer UNESCO kedua di Kalimantan Barat, setelah Danau Sentarum pada tahun 2018. Karena status biosfer tidak mengubah atau

membatasi izin usaha yang ada, operasi saat ini dapat dilanjutkan, dengan peluang tambahan untuk memanfaatkan branding produk cagar biosfer.

### **Delta Kapuas – Perhutanan Sosial Berbasis Komunitas untuk Mitigasi Perubahan Iklim**

Proyek [Delta Kapuas](#) adalah inisiatif mitigasi iklim yang dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial berbasis komunitas yang dirancang untuk melestarikan sekitar 125.000 hektar hutan, rawa gambut, dan hutan bakau. Menyadari bahwa pendapatan dari penjualan HHBK tidak berkelanjutan atau cukup untuk perlindungan atau restorasi lanskap skala besar, proyek ini beralih ke [pasar karbon sukarela](#). Meskipun proyek ini telah memberikan manfaat bagi 25 desa dengan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tantangan utama tetap ada—terutama tekanan untuk konversi kelapa sawit dan dampak iklim seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir.

### **Otoritas Pemohon Subnasional Pertama CDP**

Kalimantan Barat menjadi pemerintah subnasional pertama yang mengambil peran sebagai Otoritas Pemohon pada platform pengungkapan iklim [CDP](#). Data dan pelaporan yang lebih baik dapat memperkuat aksi iklim yurisdiksional, dan Kalimantan Barat telah memulai pengumpulan data dari aktor-aktor yang beroperasi di dalam yurisdiksi tersebut. Sejauh ini, catatan mencakup 14 perusahaan kehutanan, 28 perusahaan kelapa sawit, dan delapan kelompok petani hutan. Secara historis, lembaga keuangan dan perusahaan pembelian multinasional besar telah meminta informasi dari perusahaan dan pemasok. Namun, dengan adanya otoritas pemohon di tingkat subnasional, akan memungkinkan harmonisasi di seluruh domain publik dan swasta.

### **Pengelolaan Air Terpadu di Perkebunan Kayu Lahan Gambut**

PT Wana Subur Lestari, sebuah perusahaan konsesi dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Forestry Co. (SFC), mempresentasikan contoh pengelolaan hutan lahan gambut yang bertanggung jawab berdasarkan Manajemen Air Terpadu. SFC mengembangkan area pengelolaan lahan gambut seluas 140.000 hektar, termasuk perkebunan kayu dan hutan di sekitarnya. Bahkan dengan infrastruktur berbiaya rendah seperti pintu air, pengelolaan air yang proaktif mengurangi risiko banjir, kebakaran, dan penurunan permukaan tanah sambil mempertahankan produktivitas kayu dan tingkat air tanah serta kelembaban tanah yang tinggi.

### **POIN-POIN PENTING DARI SESI INI**

Kalimantan Barat terus menghadapi tekanan deforestasi dan degradasi yang tinggi. Responsnya semakin difokuskan pada pengaitan aksi iklim dengan pembangunan ekonomi lokal melalui rantai nilai komoditas berkelanjutan dan pengelolaan berbasis lanskap. Meskipun pasar karbon dan inisiatif yang dipimpin masyarakat seperti kehutanan sosial menawarkan solusi yang menjanjikan, mereka menghadapi tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan kebutuhan akan pembiayaan jangka panjang yang andal. Pada akhirnya, keberhasilan yang

berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas, dan koordinasi yurisdiksi yang jelas untuk memberdayakan masyarakat lokal dan melindungi ekosistem vital.

### **TINDAKAN PRIORITAS UNTUK DILANJUTKAN**

- Memperkuat pengumpulan data dan kepatuhan yurisdiksi. Melanjutkan keterlibatan dengan kerangka kerja Otoritas Pemohon CDP untuk pengumpulan data di seluruh domain publik dan swasta, termasuk perusahaan kehutanan, produsen minyak sawit, dan kelompok petani hutan.
- Meningkatkan pertukaran pengetahuan di antara anggota GCF Task Force untuk berbagi pelajaran yang dipetik dari inisiatif seperti MAJU Kalbar, Delta Kapuas, dan program Cagar Biosfer UNESCO.

### **MODERATOR**

- Haryono Hansen Sirait, Manajer Regional, CDP
- Eric Natanael, Direktur, Harapura Impact

### **PEMBICARA**

- Ibu Yenny, Divisi Perencanaan dan Kepatuhan Lingkungan Hidup, mewakili Adi Yani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat (Bapak Yani tidak dapat hadir karena kebakaran yang masih terjadi di Kalimantan Barat.)
- Profesor Farah Diba, Dekan Departemen Kehutanan, Universitas Tanjungpura
- Fajri Nailus Subchi, Direktur SAMPAN Kalimantan
- Asep Andi Yusup, General Manager Pengelolaan Air, PT Wana Subur Lestari, Sumitomo Forestry Group
- Ari Suharto, Direktur, Yayasan Bumi Eka Lestari (BATARI)

### 3. Memanfaatkan Pasar untuk Melindungi Infrastruktur Alam: Pasar Karbon dan Mekanisme Solusi Berbasis Alam

Sesi tersebut mengkaji bagaimana pasar karbon dan solusi serta mekanisme berbasis alam dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan sinergi antara sektor publik dan swasta.



#### IETA dan Perdagangan Berbasis Pasar yang Efektif

Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional (International Emissions Trading Association, IETA) bekerja sama dengan 300 perusahaan terbesar di dunia dan memberdayakan sektor swasta untuk terlibat dalam aksi iklim dengan mendukung pembentukan perdagangan emisi dan penyerapan gas rumah kaca berbasis pasar yang efektif. Pasal 6 Perjanjian Paris, yang menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama internasional melalui pasar karbon, dibahas secara rinci. Permintaan global untuk Hasil Mitigasi yang Ditransfer Secara Internasional (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO) Pasal 6 semakin meningkat, dan IETA menemukan bahwa 83% responden bersedia membayar premi untuk ITMO dibandingkan kredit lainnya. Salah satu kekhawatiran utama adalah ketidakpastian kerangka kerja negara tuan rumah. [Kemitraan Bisnis untuk Implementasi Pasar](#) (Business Partnership for Market Implementation, B-PMI) IETA dibentuk untuk melengkapi Kemitraan untuk Implementasi Pasar

(Partnership for Market Implementation, PMI) Bank Dunia; B-PMI mendukung implementasi instrumen penetapan harga karbon di negara-negara PMI melalui peningkatan kapasitas sektor swasta dan keterlibatan dengan para pembuat kebijakan.

### **Belajar dari Keberhasilan Program Batas dan Investasi Emisi California**

[Program Sistem Batas Emisi dan Investasi](#) (Cap-and-Invest Program) California, yang dikelola oleh Badan Sumber Daya Udara California (California Air Resources Board, CARB), adalah contoh sukses dari sistem perdagangan emisi kepatuhan yang dipimpin oleh pemerintah daerah, yang kebetulan merupakan salah satu pasar kepatuhan terbesar di dunia. Faktor dan strategi yang telah berkontribusi pada keberhasilan program dan tingkat kepatuhan hampir 100% meliputi meminimalkan biaya bagi industri sambil memaksimalkan manfaat, memberikan insentif untuk tindakan sukarela sejak dini, memberikan fleksibilitas kepatuhan, dan mengelola beban administratif dan kebocoran. Untuk mengatasi kekhawatiran sektor swasta tentang biaya, kelayakan, dan legalitas, CARB mengadakan lebih dari 30 lokakarya sebelum adopsi peraturan. CARB membangun hubungan, menyediakan dokumen panduan, lembar fakta, dan pemberitahuan pasar. Kondisi pendukung lainnya untuk program yang sukses meliputi proses desain yang publik dan transparan, pelaporan yang jelas dengan verifikasi pihak ketiga, akses yang sama terhadap informasi pasar, pemantauan dan penegakan hukum yang kuat, perlindungan industri dari kebocoran, dan investasi hasil di masyarakat.

### **Standar ART/TREES untuk**

Arsitektur untuk Transaksi REDD+ (Architecture for REDD+ Transactions, ART) mengelola [Standar Keunggulan Lingkungan REDD+](#) (The REDD+ Environmental Excellence Standard, TREES) dan berfungsi sebagai tolok ukur kualitas untuk REDD+ yurisdiksional. Kredit TREES dapat dimonetisasi melalui negara-negara (Pasal 6 atau Pembayaran Berbasis Hasil), Maskapai Penerbangan ICAO untuk CORSIA, perusahaan dengan target sukarela, Koalisi LEAF, dan dana investasi atau broker pasar karbon. Terdapat berbagai pilihan untuk kemitraan publik-swasta termasuk dengan aktivitas yang saling terkait.

### **Program JREDD+ Tingkat Provinsi Pertama di Indonesia**

Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur dengan [Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan](#) (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) Bank Dunia merupakan program JREDD+ tingkat provinsi pertama di Indonesia. FCPF mendorong upaya mitigasi dan konservasi lahan oleh perusahaan kelapa sawit sekaligus mempercepat adopsi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Setelah tantangan implementasi awal, sebuah organisasi perantara ditunjuk untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan transparan, terutama dengan MAKL. Ke depannya, penguatan kerangka kebijakan dan kemitraan strategis sangat penting untuk mendukung adopsi PPP yang lebih luas dan berkelanjutan.

### **Paradoks REDD+**

Carlos Aragon, Direktur Negara GCF Task Force Brasil, membahas paradoks REDD+: REDD+

adalah solusi iklim berbasis alam yang paling menjanjikan sekaligus paling diperdebatkan. Terdapat permintaan tinggi untuk proyek karbon di bidang kehutanan dan penggunaan lahan, tetapi untuk mendorong kemajuan, kita harus beralih dari memperdebatkan "integritas tinggi" ke mewujudkannya. Dan untuk menarik investasi REDD+, kita membutuhkan advokasi nasional, advokasi internasional bersama, komunikasi yang lebih baik tentang manfaat REDD+, keterlibatan aktif dalam proses konsultasi global (Koalisi Terbuka untuk Kepatuhan Pasar Karbon atau [Open Coalition on Compliance Carbon Markets](#)), dan memberikan masukan untuk Peta Jalan Deforestasi dan REDD+ COP31 mendatang.

### **POIN-POIN PENTING DARI SESI INI**

Untuk berhasil meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pasar karbon dan program REDD+ yurisdiksional, pemerintah harus menetapkan kerangka peraturan yang jelas, sinyal pasar yang dapat diprediksi, perlindungan yang kuat, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil. Kolaborasi awal dan berkelanjutan antara perusahaan swasta, mitra teknis, dan masyarakat setempat memastikan bahwa proyek pengurangan emisi selaras dengan strategi bisnis perusahaan sekaligus memberikan kepercayaan dan pembagian manfaat yang transparan. Pergeseran pola pikir yang penting diperlukan: sektor swasta harus melihat pengurangan emisi tidak hanya sebagai kewajiban peraturan, tetapi juga sebagai peluang investasi yang dapat menghasilkan nilai lingkungan dan sosial jangka panjang yang bermakna.

### **TINDAKAN PRIORITAS UNTUK DILANJUTKAN**

- Terus tingkatkan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan inisiatif GCF Task Force baru-baru ini seperti kursus REDD+ GCF Task Force Brasil dan kunjungan GCF Task Force Indonesia ke CARB.
- Jelajahi program B-PMI IETA di Indonesia dan Brasil.
- Terus memberikan masukan untuk Peta Jalan Deforestasi dan REDD+ COP30 (dan COP31)
- Berinteraksi dengan program REDD+ yang sudah ada di wilayah hukum tertentu, seperti di Guyana, untuk belajar dari pengalaman mereka dan menerapkan praktik terbaik berdasarkan hasil yang diperoleh.

### **MODERATOR**

- Jason Gray, Direktur Proyek, GCF Task Force
- Syahrina D. Anggraini, Direktur Negara GCF Task Force- Indonesia

## **PEMBICARA**

- Björn Fondén, Manajer Kebijakan Internasional - Pimpinan APAC, International Emissions Trading Association (bergabung secara virtual)
- Shannon Dilley, Kepala Penasihat Hukum, California Air Resources Board
- Arif Budiman, Manajer Teknis Senior, Architecture for REDD+ Transactions
- Prof. Dr. Ir. Daddy Ruhiyat, Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur dan Profesor di Universitas Mulawarman
- Carlos Aragon, Direktur Negara GCF Task Force - Brasil

## 4. NDPE untuk Komoditas Berkelanjutan

Sesi ini membahas bagaimana komitmen NDPE dapat ditingkatkan di tingkat lanskap dengan data, pemantauan, kolaborasi, dan pendanaan inovasi yang lebih baik.



### **Membangun Argumen Bisnis untuk Pendekatan Lanskap dengan CDP.**

[CDP](#) memperkenalkan kuesioner lanskapnya pada tahun 2020 sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan akan pendekatan lanskap dan menemukan bahwa argumen bisnisnya masih sulit; investasi perusahaan rata-rata dalam inisiatif lanskap yang kredibel adalah sekitar \$300.000 USD. CDP mendorong perusahaan untuk menggunakan anggaran pengadaan untuk biaya ini, bukan hanya anggaran keberlanjutan. Ada "kebutuhan untuk beralih dari keberlanjutan rantai pasokan menuju ketahanan lanskap, karena risiko yang paling penting bagi bisnis semakin terjadi pada skala lanskap."

### **Sertifikasi Sukarela yang Berhasil di Michoacán, Meksiko**

Penggundulan hutan dan perubahan penggunaan lahan untuk tanaman ekspor, terutama alpukat, merupakan ancaman terbesar bagi hutan dan keanekaragaman hayati di Michoacán. Pada tahun 2024, sistem pengawasan satelit dan AI bernama [Guardian Forestal](#) diimplementasikan untuk menyediakan pemantauan hampir secara real-time terhadap penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, kebakaran, penggunaan air, dan banyak lagi. Sistem ini memungkinkan perlindungan bagi para pembela lingkungan dan sertifikasi alpukat bebas penggundulan hutan secara sukarela yang disebut [Alpukat ProForest](#) (ProForest Avocado, PFA). Saat ini, lebih dari 59.000 kebun alpukat, hampir 38.000 waduk air, dan enam juta hektar lahan dipantau; 65 rumah pengemasan; empat pabrik pengolahan, tiga importir AS, dan empat pemasar telah disertifikasi, sementara 34 kotamadya telah mengalami pengurangan penggundulan hutan. Michoacán mendorong pemerintah federal untuk mewajibkan sertifikasi alpukat dan juga memperluasnya ke sertifikasi agave dan beri.

### **Kekuatan Kolaborasi di Peru**

[Persemakmuran Regional Amazon](#) (Mancomunidad Regional Amazónica, MRA) menyatukan tujuh wilayah di Amazon Peru (termasuk enam anggota GCF Task Force - Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, dan Ucayali – dan satu non-anggota, Cusco) untuk mempromosikan pembangunan rendah emisi dan produksi berkelanjutan. Aktor sektor swasta utama di Amazon Peru adalah produsen skala kecil dan MRA mempromosikan [ExpoAmazónica](#), pameran bisnis terpenting di Amazon Peru. MRA juga merupakan anggota [Koalisi untuk Komoditas Berkelanjutan](#) (Coalición por una Producción Sostenible), sebuah platform publik-swasta yang terdiri dari lebih dari 100 organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan koordinasi dengan sektor swasta. Koalisi ini memiliki perjanjian keberlanjutan sektoral di bidang kopi, kakao, peternakan, dan minyak sawit.

### **Kolaborasi dan PJL di La Libertad, Peru**

La Libertad, Peru, adalah anggota [Platform Makro-Regional Hutan Utara Peru](#) (Plataforma Macrorregional Bosques del Norte) bersama dengan anggota GCF Task Force Piura dan Tumbes, pengamat GCF Task Force Lambayeque, dan non-anggota Cajamarca. Bersama-sama, mereka mempromosikan konservasi, restorasi, dan pembangunan berkelanjutan hutan utara Peru, termasuk hutan kering musiman, hutan bakau, hutan pegunungan, Yunga, Parámos, dan lainnya. La Libertad telah berupaya mengubah restorasi menjadi portofolio siap investasi bagi investor swasta, misalnya dengan program Pembayaran untuk Jasa Lingkungan (PJL) air mereka, yakni Mekanisme Pembayaran atas Jasa Ekosistem (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, MERESE). Didukung oleh pungutan 0,8% pada tagihan air dan saluran pembuangan lokal serta perjanjian dengan pemangku kepentingan lokal di empat hulu sungai, inisiatif MERESE dari La Libertad telah berhasil menanam 9.000 pohon, mendirikan pembibitan dengan kapasitas 22.000 bibit, dan mengembangkan rencana investasi senilai \$1 juta USD. La Libertad juga mengembangkan model bisnis peternakan kambing berkelanjutan sambil memperluas kemitraan dengan sektor agro-ekspor untuk mendorong restorasi regional.

### **Memfasilitasi Kepatuhan Petani Kecil di Kalimantan Tengah, Indonesia**

Sawit merupakan pendorong deforestasi terbesar di Kalimantan Tengah, Indonesia. Terdapat sekitar 1,8 juta hektar lahan kelapa sawit di provinsi ini, 48% di antaranya berada di kawasan hutan dan 22% merupakan perkebunan milik petani kecil. Sejak menjadi anggota GCF Task Force, pemerintah provinsi memiliki lebih banyak mitra untuk membantu pemetaan lahan petani kecil, yang telah meningkatkan kepatuhan. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dirancang untuk menghindari penggundulan lahan dengan meningkatkan produktivitas melalui akses ke benih unggul dan mempromosikan keberlanjutan melalui fasilitasi sertifikasi ISPO.

### **Visi Pertanian Berkelanjutan di Caquetá, Kolombia**

Sebagai departemen peternakan sapi terbesar keempat di Kolombia, Caquetá mengatasi deforestasi dengan beralih dari praktik penebangan hutan ke lanskap produktif dan regeneratif. Dengan mempromosikan produksi sapi regeneratif dan agroforestri yang beragam, departemen ini telah meningkatkan produktivitas dan melindungi sumber daya serta jasa ekosistem tanpa memperluas lahan pertanian. Mekanisme yang digunakan meliputi meminimalkan dampak buruk El Niño terhadap produktivitas dengan menggunakan PJJ untuk menambah pakan dan memastikan pasokan air, mempromosikan produk bernilai tambah berkelanjutan melalui [Program Pembangunan yang Berfokus pada Wilayah](#) (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET), dan menciptakan aliansi termasuk dengan lembaga penelitian seperti [Lembaga Penelitian Ilmiah Amazon SINCHI](#) (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI).

### **Keberlanjutan Agribisnis dan Petani Kecil di Indonesia**

Olam Agri, sebuah perusahaan agribisnis global yang berfokus pada pasar konsumsi akhir dengan pertumbuhan tinggi, bermitra dengan GIZ untuk menciptakan [Inisiatif Karet Alam Berkelanjutan](#) (Sustainable Natural Rubber Initiative, SNRI) dalam kerangka kerja Pertanian Berkelanjutan untuk Ekosistem Hutan (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems, SAFE). Tujuan SNRI adalah untuk “meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan inklusi pasar petani karet skala kecil, dan berupaya menuju budidaya karet tanpa deforestasi.” SNRI memiliki kemitraan dengan lebih dari separuh perusahaan ban global terkemuka. Untuk meningkatkan hasil panen, meningkatkan keberlanjutan, dan mempromosikan kesiapan EUDR, SNRI melibatkan 2.000 pertanian skala kecil, yang sebagian besar dikelola oleh perempuan, dan memberikan pelatihan serta bantuan terkait masalah legalitas dan kepemilikan lahan.

### **POIN-POIN PENTING DARI SESI INI**

Mewujudkan produksi komoditas berkelanjutan membutuhkan pergeseran dari proyek-proyek terisolasi ke pendekatan kolaboratif dan menyeluruh yang menyelaraskan pemerintah, produsen kecil dan besar, masyarakat, dan pembeli di sekitar data dan tujuan bersama. Kunci keberhasilannya adalah menggabungkan regulasi, teknologi, insentif pasar, pembiayaan, dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi sehingga produksi berkelanjutan tetap kompetitif sekaligus memberikan manfaat bagi hutan, masyarakat, dan ekonomi lokal.

### **TINDAKAN PRIORITAS UNTUK DILANJUTKAN**

- Berkolaborasi dengan CDP untuk meningkatkan keterbukaan data di antara anggota GCF Task Force .

- Kami akan melanjutkan rangkaian webinar kesiapan EUDR kami sambil membahas isu-isu yang telah dibahas di sini, khususnya inklusi petani kecil dan peningkatan kapasitas.
- Membantu yurisdiksi dalam implementasi program pemantauan berbiaya rendah dan berteknologi tinggi seperti Guardian Forestal di Michoacán, sambil memperluas platform publik-swasta dan perjanjian sektoral di seluruh komoditas berdampak tinggi (misalnya, alpukat, kopi, kakao, dan minyak sawit).
- Kemajuan dalam pertukaran teknis melalui kemitraan, seperti dengan Program Amazonia+ yang didanai Uni Eropa (Mecanismo de Intercambio de Políticas Públicas Subnacionales para la Gestión Ambiental Sostenible de la Amazonía (MIPA) untuk pemerintah subnasional Amazon).

#### **MODERATOR**

- Fakhrizal Nashr, Manajer Regional – Kehutanan, CDP
- Daniel Coronel, Wakil Koordinator, GCF Task Force Peru

#### **PEMBICARA**

- Sekretaris Lingkungan Hidup Alejandro Méndez López, Michoacán, Meksiko
- Manajer Lingkungan Regional Frank Eduardo Sánchez Romero, La Libertad, Peru
- Sekretaris Lingkungan Hidup dan Pertanian Juan Pablo Jaramillo, Caquetá, Kolombia
- Domingos Neves JDC, Analis Kebijakan, Dinas Perkebunan, Kalimantan Tengah, Indonesia (atas nama Wakil Gubernur Edy Pratowo)
- Luis Augusto Briceño Jara, Direktur Eksekutif, Persemakmuran Regional Amazon (Mancomunidad Regional Amazónica, MRA)
- Claire Prescott, Kepala Bidang Tempat Berkelanjutan, CDP
- Robi Ramdani, Manajer Pengadaan Berkelanjutan yang Bertanggung Jawab, Olam Agri

## 5. Mendukung Mitigasi dan Adaptasi melalui Mekanisme Pembiayaan Hukum Inovatif (BLUD)



Sesi ini menyoroti potensi peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai mekanisme kelembagaan dan pembiayaan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi iklim di tingkat lokal. BLUD merupakan unit pelayanan publik semi-otonom yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan penyampaian pelayanan publik sekaligus memungkinkan fleksibilitas keuangan dan manajerial yang lebih besar daripada lembaga birokrasi standar, namun tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan tunduk pada akuntabilitas publik. Oleh karena itu, BLUD dapat menyediakan mekanisme kelembagaan dan keuangan yang lebih fleksibel untuk memberikan pelayanan publik terkait iklim, memungkinkan pendapatan dan kemitraan untuk mendukung kebutuhan operasional sambil tetap akuntabel dalam sistem pemerintahan lokal.

Diperlukan panduan kebijakan yang jelas dan kolaborasi yang diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja kelembagaan yang efektif bagi implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan program-program terkait iklim. Para pemangku kepentingan sepakat tentang perlunya memperkuat kebijakan dan program iklim regional, memberdayakan masyarakat, dan mengeksplorasi BLUD sebagai alat untuk meningkatkan skala aksi iklim dan mengatasi tantangan kelembagaan dan pembiayaan.

## **POIN-POIN PENTING DARI SESI INI**

BLUD dapat berfungsi sebagai instrumen kelembagaan dan operasional untuk mendukung implementasi NEK dan program mitigasi dan adaptasi iklim di tingkat regional. Kolaborasi dengan BLUD provinsi dapat menyediakan mekanisme penting untuk mendukung dan meningkatkan skala program yang diprakarsai oleh pemerintah distrik.

BLUD harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memfasilitasi aksi iklim, pembiayaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi regional. Koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya akan sangat penting untuk menerjemahkan kerangka kebijakan yang ada menjadi tindakan mitigasi dan adaptasi konkret di lapangan.

## **TINDAKAN PRIORITAS UNTUK DILANJUTKAN**

- Jelajahi BLUD sebagai “entitas yang ditunjuk” untuk membantu mengelola pendanaan iklim bagi yurisdiksi anggota GCF Task Force di Indonesia.
- Jelajahi entitas fleksibel mirip BLUD di yurisdiksi non-Indonesia.

## **MODERATOR**

- Juliarta Bramansa Ottay, Direktur Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA)

## **PEMBICARA**

- H. Yudia Ramli, Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia (bergabung secara virtual)
- Ratih Mulia Fazriati, Peneliti Hukum Universitas Padjadjaran
- Profesor Gusti Hardiansyah, Ketua Pokja REDD+ Kalimantan Barat dan Guru Besar Kehutanan Universitas Tanjungpura
- Nelson Sasarari, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Papua Selatan, Indonesia
- Nurmindia Yurika Hartuti, Staf Subdirektorat BLUD Kementerian Dalam Negeri, Indonesia

## Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang berorientasi ke masa depan untuk jaringan GCF Task Force dan para mitranya:

**Mengembangkan perangkat panduan bersama untuk model kemitraan publik-swasta.**

Keragaman pendekatan yang disajikan—mulai dari Pembiayaan Proyek untuk Keberlanjutan hingga dana konservasi hingga penataan pasar karbon—mewakili portofolio mekanisme yang telah teruji. Mendokumentasikan dan mensistematiskan model-model ini ke dalam perangkat panduan praktis akan membantu yurisdiksi lain menilai pendekatan mana yang paling sesuai dengan konteks dan kesiapan mereka.

**Membangun jaringan pembelajaran antar-pihak mengenai kesiapan pasar karbon.** Banyak yurisdiksi GCF Task Force berada pada tahap pengembangan pasar karbon yang berbeda. Mekanisme pembelajaran antar-pihak yang terstruktur — yang memasangkan yurisdiksi berpengalaman seperti California atau Mato Grosso dengan yurisdiksi yang baru memulai perjalanan pasar karbon mereka — dapat mempercepat kesiapan yurisdiksi dan mengurangi risiko kesalahan awal yang mahal. Hal ini akan dibangun berdasarkan [pertukaran pengetahuan sebelumnya](#) seperti yang dilakukan antara California dan Indonesia yang diselenggarakan oleh GCF Task Force pada Februari 2026.

**Memperkuat platform untuk keterlibatan sektor swasta di tingkat yurisdiksi.** Pertukaran tersebut menyoroti pentingnya menciptakan titik masuk terstruktur bagi perusahaan untuk terlibat dengan program yurisdiksi — melalui platform pengungkapan, buku panduan investasi, kelompok aksi korporasi, dan badan tata kelola multi-pemangku kepentingan. Memperluas platform ini ke lebih banyak yurisdiksi harus menjadi prioritas.

**Mengatasi kesenjangan pembiayaan antara biaya awal dan pembayaran berbasis hasil.**

Sesi-sesi tersebut menyoroti tantangan dalam memobilisasi sumber daya untuk Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification, MRV), keterlibatan masyarakat, dan pengembangan proyek sebelum pendapatan karbon atau jasa ekosistem tersedia. Merancang instrumen pembiayaan campuran dan mekanisme kelembagaan — termasuk BLUD dan dana konservasi — untuk menjembatani kesenjangan ini akan sangat penting.

**Mengintegrasikan dukungan bagi petani kecil ke dalam strategi lanskap dan komoditas.**

Seiring dengan perubahan rantai pasokan global yang disebabkan oleh EUDR, NDPE, dan persyaratan keberlanjutan lainnya, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa petani

kecil dilibatkan, bukan dikecualikan. Hal ini membutuhkan investasi dalam legalitas lahan, ketertelusuran, peningkatan kapasitas, teknologi, dan akses pasar di tingkat yurisdiksi.

**Terus membangun basis bukti untuk Ekonomi Hutan Baru.** Pertukaran ini menunjukkan bahwa Ekonomi Hutan Baru bukan lagi sekadar konsep, melainkan sedang dibangun di lapangan di berbagai benua. Melacak dan mengkomunikasikan hasil dari inisiatif yurisdiksi ini (dalam hal pengurangan deforestasi, investasi yang dimobilisasi, mata pencaharian yang didukung, dan emisi yang dikurangi) akan sangat penting untuk menunjukkan bahwa konservasi dapat bersaing secara finansial dengan konversi.

## **MELIHAT KE DEPAN**

Mewujudkan ketahanan lanskap jangka panjang membutuhkan langkah melampaui proyek-proyek jangka pendek dan terisolasi, serta mengintegrasikan konservasi ke dalam kemitraan yurisdiksi multi-pemangku kepentingan. Dengan memadukan investasi publik-swasta, memanfaatkan pasar karbon, dan membangun sistem pemantauan yang transparan, pemerintah subnasional dapat membangun model tangguh yang menyelaraskan pembangunan berkelanjutan dengan perlindungan lingkungan. Yang terpenting, mengintegrasikan masyarakat adat dan petani kecil melalui pemberian hak kepemilikan tanah, peningkatan kapasitas, dan peluang ekonomi yang layak memastikan bahwa konservasi secara aktif mendukung mata pencaharian lokal sambil melestarikan ekosistem dan jasa-jasanya.

Pertukaran Teknis ini memperkuat pesan utama: GCF Task Force dan para anggotanya secara aktif membangun Ekonomi Hutan Baru dari bawah. Pengalaman yang dibagikan di delapan negara menunjukkan bahwa model-model tersebut sudah ada, momentumnya sedang dibangun, dan jalan ke depan membutuhkan pendalaman kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lokal, dan mitra internasional.

GCF Task Force akan terus mendukung yurisdiksi anggotanya dalam mengubah pelajaran dari pertukaran ini menjadi tindakan, berdasarkan pemahaman bersama bahwa hutan bukanlah biaya yang harus dikelola, melainkan aset yang harus diinvestasikan — untuk kepentingan masyarakat, ekonomi, dan iklim.